

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, Potensi Pengembangan Pariwisata dalam Perspektif *Reinventing Government* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, yang menggunakan metode kualitatif eksploratori dengan analisis data menurut Miles dan Huberman, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesesuaian antara implementasi perspektif *Reinventing Government* terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah mencapai tingkat kesesuaian 80 %. Tingkat ini diperoleh dari hasil 10 prinsip yang terdapat dalam *Reinventing Government*, Disbudpar Kabupaten Lamongan memenuhi 8 (delapan) prinsip, sedangkan dua prinsip yang lainnya kurang memenuhi. Adapun penjabaran dari hasil kesimpulan tersebut adalah 8 (delapan) prinsip yang sesuai yakni : a) Pemerintahan Katalis; b) Pemerintahan Milik Masyarakat; c) Pemerintahan Kompetitif; d) Pemerintahan digerakkan Misi; e) Pemerintahan Berorientasi Hasil; f) Pemerintahan Berorientasi Pelanggan; g) Pemerintahan Wirausaha; h) Pemerintahan Antisipatif. Sedangkan terdapat dua implementasi prinsip *Reinventing Government* yang belum terpenuhi yakni: a) Pemerintahan Desentralisasi; b) Pemerintahan Berorientasi pada Pasar. Pemerintah berorientasi desentralisasi belum memenuhi karena Disbudpar Kabupaten tidak memiliki otoritas

sepenunhya untuk mengelola seluruh potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Lamongan. Hal ini terbukti Disbudpar Kabupaten Lamongan hanya menaungi kawasan wisata Makam Sunan Drajat dan Waduk Gondang, sedangkan WBL dan Mazoola dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sedangkan pemerintah berorientasi pada pasar belum memenuhi karena Disbudpar belum menjalin sebuah kerjasama yang sinergis dengan pihak swasta untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Lamongan. WBL dan Mazoola memang melakukan sebuah kerjasama dengan pihak swasta, namun kedua wisata tersebut dalam naungan dan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melakukan sebuah kegiatan pengelolaan salah satunya menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Sementara wisata Makam Sunan Drajat dan Waduk Gondang yang dalam naungan Disbudpar Kabupaten Lamongan masih bergantung pada anggaran daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan.

2. Sementara faktor pendorong dan penghambat pengembangan potensi pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong pengembangan potensi pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan:

- 1) Potensi alam Kabupaten Lamongan yang memiliki daya tarik yakni terdiri dari pantai serta bebatuan sehingga ditetapkan sebagai Kawasan A daerah tujuan wisata Provinsi Jawa Timur.

- 2) Disbudpar memiliki kebijakan strategis yang sangat baik dengan didukung oleh analisis untuk pemecahan masalah yang ada.
 - 3) Disbudpar memiliki metode strategi yang sangat komprehensif dalam pengembangan potensi pariwisata, tinggal bagaimana mengelola metode strategi tersebut.
 - 4) Program perbaikan sarana prasarana yang diselenggarakan setiap tahun oleh Disbudpar Kabupaten Lamongan.
 - 5) Daya tarik wisata Kabupaten Lamongan yang memiliki keanekaragaman dan bisa dikembangkan menjadi kawasan pusat pariwisata sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.
- b. Faktor penghambat pengembangan potensi pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan:
- 1) Kemajuan Iptek dan peradaban dunia, maka nilai-nilai luhur seni budaya nasional dan daerah semakin pudar akibat pergeseran pola hidup dan cara berfikir generasi sekarang dan mendatang.
 - 2) Belum optimalnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam program pengembangan pariwisata di Kabupaten Lamongan.
 - 3) Belum bisa memaksimalkan peluang untuk menjalin kerjasama dengan kalangan swasta dalam pengembangan semua aspek yang berkaitan dengan budaya dan wisata.

- 4) Keterbatasan dana di daerah guna mendukung pembangunan sarana dan prasarana penunjang objek wisata termasuk aktualisasi seni budaya.
- 5) Minimnya investasi dalam negeri dan asing terhadap pembangunan bidang wisata sehingga pengembangan pariwisata tidak maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang akan diajukan oleh peneliti dari hasil kajian dan analisis adalah sebagai berikut:

1. Disbudpar Kabupaten Lamongan dapat mengkaji ulang untuk revitalisasi implemetasi *reinventing government* karena peneliti merasa masih relevan dalam rangka pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Lamongan.
2. Disbudpar harus mulai untuk berani menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata, karena jika hanya menggantungkan pada anggaran daerah maka pengembangan pariwisata tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kerjasam ini dapat berupa *Public Private Partnership* (PPP) berbentuk *Build-Operate-Transfer* (BOT).
3. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Lamongan berani menyerahkan wewenang sepenuhnya untuk mengelola pariwisata kepada Disbudpar Kabupaten Lamongan sebagai mandataris desentralisasi.

4. Disbudpar kabupaten Lamongan seharusnya melakukan pelatihan dan penguasaan Iptek agar dapat melakukan proses pengembangan berbasis teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi dunia.
5. Disbudpar Kabupaten Lamongan merevitalisasi kembali program Kelompok Sadar Wisata (KSW) yang sudah dibentuk. Karena KSW ini dirasa potensial untuk mengenali permasalahan yang ada di objek wisata serta dapat membantu melakukan promosi-promosi pariwisata.
6. Disbudpar harus mulai mencari investor yang berkenan investasi di pariwisata Kabupaten Lamongan selain WBL dan Mazoola untuk mengatasi masalah keterbatasan dana.
7. Disbudpar harus mulai berani berinovasi dengan membangun sebuah *landmark* (situs buatan) pariwisata yang megah sehingga dapat menarik minat investor dan wisatawan baik nasional maupun mancanegara.
8. Strategi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata yang seharusnya sudah dicanangkan di beberapa objek wisata yang memiliki potensi ekowisata,